

MODEL PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BERBASIS KETRAMPILAN DAN KLASTER EKONOMI DI PROVINSI ACEH¹

Mariyudi

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
mariyudy@yahoo.com

Rasyidin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
rashid_unimal@yahoo.co.id

Ikramuddin

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
ikram_alueraya@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan strategis yang kondusif bagi pertumbuhan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, menggali pilihan-pilihan kebijakan dan kerangka-kerangka kelembagaan, menggambarkan karakteristik pasar kerja, mengidentifikasi klaster ekonomi UKM unggulan di Provinsi Aceh. Target khusus penelitian ini adalah tersedianya Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Keterampilan dan Klaster Ekonomi di Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisa Statistik Deskriptif, Community Employment Assessment (CEA), Analisa Sektor Basis (Analisa Location Quotient-LQ), Analisa Shift-share, Analisa Spesialisasi Regional, dan Metode Scoring. Dari analisa-analisa tersebut, usaha-usaha berbasis pertanian muncul sebagai sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Penambahan nilai produk yang dihasilkan dengan memberikan keterampilan tertentu diharapkan dapat membantu pelaku produksi skala mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka supaya kemiskinan dan perburuhan anak dapat secara efektif ditanggulangi. Berdasarkan analisa ini, penelitian ini merekomendasikan: 1) pembentukan jaringan penyelenggara pelatihan keterampilan dan pembuat kebijakan demi keefektifan koordinasi dan guna memudahkan dilakukannya perombakan dan pembenahan yang diperlukan; 2) penyusunan dan penerapan standar kompetensi untuk keterampilan-keterampilan pokok yang bersifat strategis; dan 3) diperkenalkannya keterampilan dan keahlian dari luar Aceh, yang diharapkan dapat terlaksana dengan bantuan donor.

Kata Kunci: UKM, keterampilan, tenaga kerja, klaster ekonomi

¹ Hasil penelitian Hibah Bersaing, DP2M Dikti Tahun 2014

PENDAHULUAN

Setiap daerah ditantang untuk berbenah diri menghadapi era persaingan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Persaingan ini menuntut setiap bangsa, negara dan daerah untuk berbenah diri dengan memberi lingkungan paling kondusif bagi pelaku bisnis dalam berusaha. Dalam konstelasi inilah, Indonesia meluncurkan kebijakan desentralisasi yang secara substansial mendefinisikan kembali peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam fungsi administratif dan fiskal.

Kawasan perkotaan di Indonesia, seperti juga perkotaan di dunia ketiga, banyak dijumpai berkembangnya industri kecil sebagai akibat tidak mampunya pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Beberapa kegiatan industri kecil bahkan masuk dalam sektor informal. Namun keberadaan mereka belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal sektor industri kecil (dan menengah) memiliki kontribusi yang nyata bagi pengatasan masalah pengangguran dan masalah perekonomian kawasan perkotaan. ILO melaporkan bahwa 60% buruh di kota-kota negara berkembang diserap oleh sektor informal dan kegiatan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Dilaporkan juga bahwa peran sektor UKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar-pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat dan kehidupan keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah yang memadai (ILO, 1991 dan Reddy et.al., 2002). Di Indonesia, sektor UKM bahkan menjadi tumpuan kehidupan yang semakin besar sejak terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 (Sarosa, 2000).

Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dahsyat berkekuatan 9.1 pada skala Richter memporakporandakan provinsi Aceh. Rangkaian gelombang pasang raksasa (tsunami) yang menyusul mengakibatkan luapan air maha dahsyat yang menggulung dan menewaskan 221,005 jiwa. Banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian karena sarana dan prasarana produksi yang mereka miliki hancur atau rusak berat.

Bantuan pun datang mengalir dan berbagai proyek rekonstruksi dimulai untuk membangun kembali wilayah tersebut. Berbagai upaya ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Aceh agar

pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dan bangkit dari keterpurukan, salah satu solusi alternatif adalah penerapan konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil menengah.

Penelitian ini diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi Aceh dan pengurangan kemiskinan dengan memfasilitasi peralihan dari tahap rekonstruksi dan rehabilitasi ke tahap pertumbuhan berkelanjutan. Menurut BPS, pada tahun 2008 angka kemiskinan di Aceh mencapai 23,5 persen; angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 15,4 persen. Kenaikan output pertanian mengurangi tingkat kemiskinan dari 28,4 persen pada tahun 2004 menjadi 23,4 persen pada tahun 2008 (BRR NAD-NIAS: 2009).

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya cita-cita untuk merevitalisasi perekonomian daerah dan mewujudkan kemakmuran Aceh melalui pengembangan keterampilan. Meskipun fokus studi ini terletak pada pengembangan keterampilan, penelitian ini sangat mengandalkan analisa ekonomi dan kebijakan guna memprakirakan permintaan keterampilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Usaha Kecil

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Usaha Mikro sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari 4 orang. Sedangkan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). *World Bank* mendefinisikan Usaha Kecil atau *Small Enterprise*, dengan kriteria: Jumlah karyawan kurang dari 30 orang; Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta; Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta.

Namun demikian pengertian terbaru mengenai Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Definisi Usaha Menengah

Pengertian Usaha Menengah menurut Badan Pusat Statistik adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 orang hingga 99 orang. Sedangkan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). *World Bank* mendefinisikan Usaha Menengah atau *Medium Enterprise* adalah usaha dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang; Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta; Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta

Sedangkan pengertian Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta upiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Bank Indonesia; <http://infoukm.wordpress.com>).

Ketrampilan

Keterampilan berasal dari kata dasar terampil. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (2001: 1180) keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, dapat disimpulkan keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas dalam usahanya untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan perlu dilatihkan kepada anak sejak dini supaya di masa yang akan datang anak akan tumbuh menjadi orang yang terampil dan cekatan dalam melakukan segala aktivitas, dan mampu menghadapi permasalahan hidup. Selain itu mereka akan memiliki keahlian yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Schmidt dalam Amung Ma'mun dan Yudha (2000: 61), keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum, tetapi dengan pengeluaran energi dan waktu yang minimum.

Menurut Soemarjadi (2001: 2) disebutkan bahwa keterampilan sama artinya dengan kata kecekatan. Terampil atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Akan tetapi dalam pengertian sempit biasanya keterampilan lebih ditujukan pada kegiatan yang berupa perbuatan. Terampil itu lebih dari sekedar memahami. Oleh karena itu untuk menjadi yang terampil diperlukan latihan-latihan praktis yang bisa memberikan stimulus (rangsangan) pada otak, agar kita semakin terbiasa.

Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran atau nalar, sedangkan perbuatan yang efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitas. Keterampilan mengandung beberapa unsur kemampuan, yaitu kemampuan olah pikir (psikis) dan kemampuan olah perbuatan (fisik) (Subana & Sunarti, 2000: 36; Yudha & Rudhyanto, 2005: 7)

Pengertian Klaster Ekonomi

Secara rinci, ada beberapa definisi tentang cluster. Porter (1990) mendefinisikan Clusters sebagai "*Clusters are geographic concentrations of firms, suppliers, related industries, and specialized institutions that occur in a particular field in a nation, state, or city.*" Definisi lain mengenai industri Clusters adalah "*geographical concentration of industries that gain performance advantages through co-location*" (Doeringer & Terkla 1995). Sementara Rosenfeld (1995) menambahkan definisi Clusters dengan "hubungan antara perusahaan yang juga menyediakan

berbagai *complementary services*, termasuk jasa konsultan, penyedia jasa pendidikan dan training, lembaga-lembaga keuangan, *professional associations* dan institusi-institusi pemerintah.

Niven dan Droge (2000) berpendapat sekurang-kurangnya ada tiga *framework* bentuk-bentuk *Cluster: Diamond model, flexible specialization* dan *collective efficiency*. Model *flexible* dan *specialization* banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang. Model *diamond* Porter banyak diterapkan pada negara-negara maju. Model *diamond* dianggap lebih *superior* dibandingkan model-model lainnya dalam menerangkan *Clusters* yang dinamis dan mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan produktivitas melalui proses industrialisasi.

Pendekatan *Cluster* model Porter merupakan pengembangan dari *industrial district* atau kawasan industri yang dikembangkan oleh Alfred Marshall pada 1920 (Desrochers dan Sautet, 2004). Berbeda dengan Marshall yang hanya fokus pada perusahaan-perusahaan sejenis, *Cluster* model Porter tidak membatasi hanya pada satu industri, tetapi lebih luas lagi. *Diamond Cluster Model*, meliputi industri-industri terkait, serta perusahaan-perusahaan yang lain yang mempunyai keterkaitan dalam teknologi, input yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan kajian terhadap perekonomian setempat guna memprakirakan permintaan/kebutuhan akan keterampilan yang digerakkan oleh pasar, antara lain dengan melihat pada ciri-ciri perekonomian provinsi, tren pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Ruang lingkup dan kedalaman analisa dibatasi pada bidang-bidang yang tadi telah disebutkan dengan memikirkan maksud dilakukannya analisa permintaan/kebutuhan akan keterampilan. Penelitian ini kemudian menganalisa permintaan/kebutuhan akan keterampilan yang timbul dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk menganalisa permintaan/kebutuhan akan keterampilan yang terdapat dalam masyarakat, studi ini menggunakan mekanisme Kajian Lapangan Kerja Masyarakat atau *Community Employment Assessment (CEA)* yang dikembangkan oleh Proyek Pelatihan Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Training for Rural Economic Empowerment*

(*TREE*). Karena jenis permintaan akan keterampilan ini jarang muncul dalam statistic tingkat makro maupun dalam dokumen kebijakan, maka interaksi dengan masyarakat daerah setempat menjadi penting guna memperoleh pemahaman akan hal itu.

Metode Analisis Data

Analisa Statistik Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan perkembangan dari waktu ke waktu dan ter-update dari berbagai indikator yang nantinya diperlukan. Deskripsi nantinya dapat ditampilkan baik dalam bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan umum sehingga memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau informasi yang diberikan dalam tulisan.

Community Employment Assessment (CEA)

Metode CEA menggunakan ilmu statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik pasar kerja yang mempengaruhi pengembangan keterampilan. Karena analisa permintaan akan keterampilan bertitik tolak dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor, maka analisa pasar kerja juga difokuskan pada lapangan kerja, upah dan produktivitas tenaga kerja berdasarkan sektor. Analisa tersebut juga mengkaji tingkat pendidikan yang dicapai angkatan kerja karena hingga batas-batas tertentu, pendidikan ikut menentukan keterampilan angkatan kerja. Diskusi kelompok fokus dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi kualitatif dari para pemangku kepentingan pokok.

Penelitian ini menjalankan analisa pasar kerja untuk menangkap tanda-tanda permintaan akan keterampilan di masa yang akan datang di Aceh. Menurut Sparreboom dan Powell, sekumpulan indikator pasar tenaga kerja yang disebutkan di bawah ini menandai permintaan akan keterampilan (Sparreboom & Powell 2009: 4): Tren pekerjaan (menurut jabatan, sektor, status pekerjaan dan wilayah geografi); tren pengangguran, Trend dan tingkat pendidikan yang dicapai/pengembangan keterampilan dalam angkatan kerja, Tren upah, Tren produktivitas, Kontribusi terhadap GDP menurut berbagai sektor perekonomian/wilayah geografi.

Prospek sektor perekonomian setempat

Akibat menyusutnya deposit gas, produk domestik bruto daerah (PDBD) mengalami penurunan (lihat Gambar 2). Meskipun dulu output migas saja sudah lebih dari setengah output daerah, porsi komoditas ini dalam PDBD berkurang menjadi 19.3 persen pada tahun 2008. Akibatnya, sektor-sektor yang berkaitan dengan migas mengalami nasib yang sama. Gambar 2 mengungkapkan bahwa industri migas kehilangan sekitar 58,6 persen outputnya antara tahun 2003 dan 2008. Sektor migas mendukung perekonomian setempat dengan menciptakan usaha-usaha terkait seperti pupuk dan semen. Output dari sektor-sektor ini termasuk dua produk yang tadi disebutkan berkurang dari 1,672 milyar rupiah pada tahun 2002 menjadi 944 milyar rupiah. Karena produk bahan bakar mineral dan minyak mineral mencakup 96,6 persen nilai ekspor komoditas di Aceh tahun 2007, ekspor bersih mengalami penurunan yang luar biasa (lihat Gambar 1).

Faktor lain yang mempengaruhi perekonomian Aceh adalah perginya secara bertahap lembaga-lembaga pemberi bantuan termasuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Nanggroe Aceh Darusalam dan Nias (BRR NAD-NIAS), organisasi-organisasi internasional dan LSM. Modal mengalir masuk ke Aceh setelah tsunami tahun 2004 untuk proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi. Pada bulan November 2006, dana-dana dari dalam negeri, donor dan LSM swasta yang dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut seluruhnya berjumlah US\$ 5,8 milyar. Alokasi dana-dana tersebut cukup besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan PDBD Aceh termasuk minyak dan gas untuk tahun 2006 yang berjumlah sekitar US\$ 7,4 milyar. Total dana yang disuntikkan untuk proyek-proyek tersebut di Aceh dan Nias diperkirakan mencapai delapan hingga sembilan milyar dolar Amerika.

Kajian Terhadap Lapangan Kerja yang Ada di Masyarakat

Jenis-jenis pelatihan yang perlu bagi masyarakat setempat mungkin tidak sama dengan jenis-jenis pelatihan yang dikembangkan untuk pekerjaan sektor formal dan yang dikembangkan berdasarkan hasil analisa makro

terhadap permintaan akan keterampilan di tingkat pusat. Peneliti telah melakukan kajian terhadap lapangan kerja yang ada dalam masyarakat di enam kotamadya/ kabupaten di Aceh, yaitu: Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe dan Langsa. Berdasarkan hasil survei dan pertemuan dengan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, tiap-tiap kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam penilaian ini mengusulkan (jenis-jenis) pelatihan keterampilan yang akan bermanfaat bagi kaum muda yang tidak bersekolah dalam masyarakat masing-masing.

Oleh banyak kalangan masyarakat, keterampilan menjahit dinilai sebagai keterampilan yang dibutuhkan. Kenyataan menunjukkan bahwa kurang lebih satu dari enam usulan pelatihan kejuruan adalah pelatihan menjahit. Sudah barang tentu ada permintaan untuk keterampilan ini karena pakaian yang khusus dibuat sesuai pesanan sering kali lebih murah daripada pakaian jadi siap pakai. Akan tetapi, persepsi mengenai besarnya permintaan akan keterampilan menjahit mungkin dipengaruhi oleh bias gender dalam pekerjaan dan kemudahan melaksanakan pelatihan karena perlengkapan, alat dan instruktur yang dibutuhkan sudah tersedia. Pada umumnya, pergeseran dari pelatihan keterampilan yang digerakkan oleh penawaran ke pelatihan keterampilan yang digerakkan oleh permintaan memerlukan pengembangan kapasitas penyelenggara pelatihan.

Masyarakat tidak menunjukkan adanya permintaan yang kuat akan keterampilan produksi dan pengolahan makanan. Hasil ini agak berbeda dari temuan analisa kebijakan potensi dan pengembangan ekonomi dan juga perspektif pemimpin-pemimpin politik dan kalangan bisnis/ usaha. Ini mungkin mencerminkan kendala-kendala ketersediaan perlengkapan dan keahlian dan juga rendahnya kesadaran akan peluang usaha pengolahan makanan. Akan tetapi, masyarakat setempat yang disurvei menangkap perubahan-perubahan selera dan melihat peluang usaha pembuatan roti dan kue.

Jenis-jenis keterampilan tradisional seperti pembuatan perabotan dan kerajinan juga berada dalam daftar meskipun permintaan akan jenis-jenis keterampilan ini tampaknya agak lemah dibandingkan permintaan akan keterampilan-keterampilan modern. Hampir setengah dari pelatihan keterampilan yang diusulkan dalam kategori ini merupakan pelatihan dalam pembuatan perabotan. Karena jumlah penduduk diharapkan akan meningkat, jumlah rumah tangga akan mengikuti tren yang sama dan permintaan akan perabotan akan meningkat secara konstan.

Analisa pasar kerja

Aceh mempunyai angkatan kerja sebanyak kira-kira 1,9 juta orang; menurut data yang terkumpul hingga bulan Februari 2009, dari jumlah tersebut, 1,7 juta di antaranya bekerja. Tingkat pengangguran di Aceh mencapai 9,3 persen; secara substansial angka ini lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional sebesar 8,1 persen. Antara tahun 2005 dan tahun 2008, angkatan kerja Aceh setiap tahun tercatat tumbuh sebesar 1,7 persen. Mengusahakan agar laju kecepatan penciptaan lapangan kerja seimbang atau sepadan dengan laju kecepatan pertumbuhan angkatan kerja tetap merupakan tantangan di Aceh. Tantangan ini terutama sangat terasa ketika proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi secara bertahap ditutup. Sebagai contoh, penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi non pemerintah menurun dari 7,000 menjadi 2,000, menyebabkan 5,000 pekerja berpendidikan tinggi mengalami pengangguran. Di samping itu, sejarah konflik berkepanjangan antara ABRI dan Gerakan Aceh Merdeka menyisakan masalah lain dalam pasar tenaga kerja daerah istimewa itu: ada banyak mantan petempur Gerakan Aceh Merdeka yang jumlahnya diperkirakan mencapai 12,400 orang dan (mantan anggota) milisi (berjumlah 6,500 orang) yang masih menganggur.

Rendahnya porsi perempuan dalam lapangan kerja di Indonesia terlihat di seluruh sektor perekonomian; hal ini mencerminkan adanya budaya bias gender. Sektor perdagangan, restoran dan hotel di Aceh mempekerjakan

perempuan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit daripada di Indonesia secara keseluruhan. Secara keseluruhan, porsi perempuan yang terserap dalam lapangan kerja yang ada di Aceh [atau jumlah perempuan di Aceh yang bekerja] agak rendah, yaitu sebesar 25,3 persen dibandingkan dengan di Indonesia secara keseluruhan yang mencapai 27,4 persen.

Usaha Mikro Dan Kecil Serta Penggunaan Tenaga Kerja

Dilihat dan ukuran usaha, usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian setempat dan pengguna terbesar angkatan kerja. Perrumbuhan UMK beserta kapasitasnya dalam menciptakan lapangan kerja adalah penting bagi nasib perekonomian setempat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi UMK. Meskipun perrumbuhan sektor industri pengolahan telah kehilangan momentum di Aceh, pada tahun 2007 terdapat 92 usaha mdustn pengolahan skala besar dan menengah yang beroperasi di Aceh (lihat Tabel 3). Hampir 40 persen dan usaha-usaha ini aktif di mdustn makanan dan mmuman. Usaha-usaha ini mempekerjakan hampir lima nbu pekerja. Segmen perekonomian ini dapat tumbuh apabila pemennth Aceh secara efektif mengatasi masalah-masalah yang dihadapi calon investor dan mengambil strategi unruk memngkatkan nilai tambah produk pertaman setempat. Beberapa usaha yang berkaitan dengan industri migas masih ada tetapi menghadapi penurunan karena deposit gas mengalami penipisan. Industn tekstil dan garmen dikenal karena proses produksinya yang padat karya tetapi usaha-usaha di industri di Aceh hanya memberikan kontribusi yang tidak seberapa bagi penyerapan tenaga kerja.

Penawaran akan pelatihan keterampilan

Hasil penelitian menunjukkan penawaran akan pelatihan keterampilan [pelatihan keterampilan yang tersedia/ ditawarkan] di tiga kabupaten yang diambil sebagai sampel di Aceh. Mohon diingat bahwa statistik di bawah ini belum tentu mencerminkan seluruh situasi penawaran akan pelatihan keterampilan yang ada di Aceh. Oleh karena itu, dalam menganalisa bagian ini hendaknya berhati-hati dalam memberikan penilaian. Meskipun demikian, bagian-bagian

wilayah Aceh yang dijadikan sampel adalah kabupaten-kabupaten yang besar; di samping itu, statistik yang dipaparkan di sini dan juga peta pelatihan keterampilan yang mengilustrasikan penawaran akan keterampilan di Aceh; informasi ini cukup memadai sehingga memungkinkan dilakukannya analisa kesenjangan.

Penyelenggara pelatihan keterampilan terbesar adalah lembaga-lembaga swasta seperti lembaga pendidikan non formal dan LSM. Pada kenyataannya, jumlah instruktur dan peserta pelatihan di lembaga-lembaga swasta hingga sejauh ini masih lebih banyak daripada di lembaga-lembaga pemerintah (Tabel 5.7). Pekerjaan membuat/ mempermak pakaian dan bordir merupakan mata pelajaran yang paling umum ditawarkan dalam pelatihan keterampilan. Setiap tahun hampir 2,000 orang mempelajari keterampilan jahit-menjahit ini di berbagai lembaga pelatihan swasta, yang meliputi 31,1 persen kapasitas pelatihan di kabupaten-kabupaten yang dijadikan sampel (Tabel 5.8). Pelatihan pertukangan di bidang reparasi dan mekanik merupakan yang kedua yang paling umum ditawarkan. Untuk pelatihan jenis ini, lembaga pelatihan pemerintah dan lembaga pelatihan swasta mempunyai kapasitas yang kurang lebih setara dari segi jumlah instruktur dan peserta pelatihan, meskipun kualitas dan alat-alat pelatihan yang digunakan mungkin tidak sebanding. Sebagian besar (58,9 persen) pelatihan keterampilan berlangsung di ruang kelas. Seperempat dari pelatihan yang ada menggabungkan pembelajaran di ruang kelas dengan pelatihan sambil bekerja atau *on-the-job training* (Tabel 4).

Analisa kesenjangan keterampilan

Bagian ini mengkaji kesenjangan antara pelatihan keterampilan yang saat ini tersedia/ ditawarkan dan permintaan/ kebutuhan akan keterampilan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang di Aceh berdasarkan informasi dan hasil analisa bagian sebelumnya. Bagian ini memadankan informasi yang ada di tabel terhadap penawaran pelatihan keterampilan sebagaimana diilustrasikan di bagian sebelumnya.

Analisa mengungkapkan bahwa penambahan nilai pada produk pertanian dan kelautan setempat melalui penerapan keterampilan

di bidang pengolahan, pengemasan dan pemasaran makanan sangat berguna untuk meningkatkan skala/ ukuran perekonomian secara berkelanjutan. Akan tetapi, dalam kabupaten-kabupaten yang dijadikan sampel, pelatihan keterampilan dalam mengolah makanan masih sangat sedikit. Keterampilan di bidang pengepakan/ pengemasan dan pemasaran, belum lagi pelatihan keterampilan di bidang higiene makanan, kendali mutu dan zat tambahan makanan, masih belum dikembangkan secara sistematis. Hal ini hendaknya diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

Pelatihan yang tersedia di bidang-bidang keterampilan yang dapat meningkatkan perekonomian agraris tampaknya masih kurang. Meskipun keahlian di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dapat diajarkan oleh pekerja yang lebih berpengalaman kepada pekerja yang relatif masih kurang berpengalaman di tempat kerja, bagaimanapun juga tetap diperlukan pelatihan untuk memperbaiki produktivitas (misalnya penggunaan pupuk dengan lebih baik, teknik pertanian/ peternakan yang lebih efektif, dan perbaikan kualitas produk pertanian/ peternakan).

Sektor keuangan mencatat cepatnya ekspansi/ perluasan usaha yang terjadi di sektor ini dalam dasawarsa terakhir. Oleh sebab itu, permintaan akan keterampilan dari sektor ini cukup tinggi. Akan tetapi, karena bank biasanya hanya memberikan pelatihan kepada karyawannya sendiri, maka hanya ada kebutuhan yang sifatnya terbatas atau bahkan mungkin tak ada kebutuhan bagi para pelaku eksternal untuk menawarkan pelatihan keterampilan kepada sektor perbankan. Akan tetapi, perlu diberikan lebih banyak pelatihan mengenai pengetahuan di bidang keuangan kepada pemilik usaha kecil dan pelaku wirausaha. Lembaga-lembaga pembiayaan mikro mungkin memerlukan pengembangan kapasitas agar dapat beroperasi dengan lebih efisien dan lebih dapat memberikan pelayanan yang berorientasi pada klien.

Pelatihan keterampilan membordir dan menjahit relatif banyak ditawarkan di daerah tersebut. Mungkin karena Aceh hanya mempunyai dua belas perusahaan tekstil dan garmen skala menengah yang mempekerjakan total 600 hingga 700 pekerja, masih ada banyak ruang bagi usaha mikro untuk beroperasi di industri tersebut. Di

samping itu, konsumen setempat cenderung membeli pakaian buatan tukang jahit karena lebih murah harganya daripada pakaian jadi siap pakai. Pelatihan keterampilan membordir dan menjahit membantu kaum perempuan²⁵ mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarganya/ rumah tangganya. Meskipun demikian, tampaknya patut dilakukan peninjauan ulang terhadap pepadanan antara penawaran dan permintaan akan keterampilan jenis ini di Aceh.

Meskipun pelatihan keterampilan komputer tersedia di kabupaten-kabupaten yang dijadikan sampel, pelatihan keterampilan lainnya yang kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha ternyata tidak atau masih belum dapat memenuhi permintaan akan pelatihan keterampilan yang diperkirakan akan dibutuhkan di pasar kerja. Karena usaha berskala mikro dan kecil merupakan tulang punggung perekonomian dan sebagian terbesar penerimaan karyawan terjadi pada usaha-usaha dalam skala tersebut, upaya mendorong dan memfasilitasi kewirausahaan serta mendorong perbaikan produktivitas usaha-usaha yang ada harus menjadi bagian terpadu dari kebijakan pengembangan keterampilan di Aceh. Penawaran akan pelatihan keterampilan yang ada saat ini tampaknya kurang optimal untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan usaha berskala kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelitian ini menganalisa kesenjangan keterampilan di Aceh dari sudut pandang bagaimana menggali potensi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Makalah ini mengkaji sektor perekonomian, rencana pembangunan dan permintaan akan keterampilan di tingkat masyarakat guna mendapatkan pemahaman mengenai permintaan akan keterampilan dalam waktu dekat. Analisa pasar kerja dan penelitian kualitatif melengkapi analisa mengenai permintaan akan keterampilan tersebut. Makalah ini kemudian membandingkan permintaan akan keterampilan yang diharapkan atau diperkirakan akan muncul dengan penawaran akan pelatihan keterampilan yang tersedia saat ini dengan

mengidentifikasi kesenjangan yang paling membutuhkan intervensi kebijakan dalam pengembangan keterampilan.

2. Penambahan nilai produk pertanian dan kelautan sangatlah penting untuk memperbaiki penghasilan secara berkelanjutan. Pada kenyataannya, Aceh mempunyai tanah yang subur dan laut yang kaya akan sumber-sumber daya kelautan. Karena itu, makalah ini menekankan pentingnya keterampilan-keterampilan di bidang pengolahan, pengemasan dan pemasaran makanan. Akan tetapi, penawaran akan pelatihan keterampilan di bidang-bidang ini masih kurang dari yang dibutuhkan.
3. Angkatan kerja yang relatif terdidik dengan baik merupakan aset lain yang dimiliki Aceh. Karena pengembangan usaha mendorong penciptaan lapangan kerja, maka upaya memupuk lingkungan usaha yang kondusif akan mendatangkan manfaat berlipat. Pelatihan keterampilan dapat ikut berperan dalam mewujudkan hal ini. Oleh sebab itu, perlu diusahakan tersedianya pelatihan keterampilan di bidang kewirausahaan dan di bidang-bidang usaha lainnya.
4. Permintaan/ kebutuhan akan keterampilan maupun penawaran akan keterampilan perlu ditinjau kembali secara berkala. Apabila terdapat kelebihan penawaran, maka sumber-sumber daya yang ada dapat dialokasikan kembali ke bidang-bidang pelatihan keterampilan yang strategis. Berpindahnya tenaga kerja muda terdidik di bidang teknik dari Aceh ke provinsi-provinsi lain merupakan pertanda telah terjadinya ketidaksepadanan antara penawaran dan permintaan akan keterampilan di provinsi tersebut.
5. Maksud studi ini adalah untuk memberikan sumbangsih bagi perumusan kebijakan pengembangan keterampilan yang lebih baik di Aceh. Standar kompetensi sangat membantu dalam memandu pengembangan keterampilan dan menjamin kualitas pelatihan. Jaringan pemangku kepentingan akan memfasilitasi proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan secara efektif.

Penelitian lebih lanjut dan lebih rinci diperlukan guna membangkitkan pengetahuan yang dapat ikut mendorong reformasi pelatihan keterampilan di Aceh.

Saran

Bagian ini memperkenalkan beberapa ide dan pilihan kebijakan yang akan membantu mempersempit kesenjangan yang telah diidentifikasi dalam bagian sebelumnya. Upaya mempersempit kesenjangan keterampilan akan memberikan iklim yang kondusif bagi pencapaian sasaran kebijakan pembangunan daerah dan juga untuk meningkatkan pendapatan produsen setempat. Pengurangan kemiskinan akan mengurangi terjadinya eksploitasi tenaga kerja anak dan dengan demikian, dapat secara efektif memotong lingkaran setan kemiskinan yang diwariskan/ diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini menekankan kebutuhan untuk mengisi kesenjangan keterampilan yang berkaitan dengan agribisnis karena produktivitas yang lebih tinggi di sektor pertanian akan mengurangi kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya alam sekaligus memudahkan terlaksananya upaya untuk memperbaiki mata pencaharian.

1. Meningkatkan jaringan penyelenggara pelatihan keterampilan dan pembuat kebijakan untuk koordinasi dan fasilitasi yang efektif. Penting untuk dicatat bahwa pengembangan keterampilan dapat berfungsi sebagai katalis untuk pembangunan daerah. Pelatihan keterampilan yang tersedia atau ditawarkan, sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, tampaknya tidak selaras dengan kebutuhan akan keterampilan strategis untuk daerah tersebut. Koordinasi yang lebih baik dan lebih dalam di antara pembuat kebijakan dan penyelenggara pelatihan keterampilan akan membantu memaksimalkan sinergi kebijakan dan meningkatkan dampak pelatihan keterampilan terhadap pembangunan daerah dan pengurangan kemiskinan. Dalam melakukan hal ini, para pelaku (misalnya pembuat kebijakan dan penyelenggara pelatihan keterampilan) sebaiknya mempunyai pemahaman yang sama mengenai bidang-bidang yang membutuhkan pelatihan keterampilan

tambahan serta memiliki kesamaan visi mengenai sasaran pembangunan dan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran ini. Oleh sebab itu, makalah ini menyarankan agar kesamaan pemahaman dan visi tersebut direkatkan dengan meningkatkan peran badan koordinasi yang menangani pengembangan keterampilan, yaitu Badan Pembina Pelatihan. Badan ini harus mengusahakan agar daftar pelatihan keterampilan selalu diperbarui sesuai dengan situasi terkini, mengkaji analisa kesenjangan, dan membahas cara-cara praktis untuk mengisi kesenjangan tersebut.

2. Mengembangkan dan menerapkan standar kompetensi untuk keterampilan-keterampilan pokok yang bersifat strategis. Pengembangan keterampilan memerlukan standar yang dapat dijadikan panduan bagi penyelenggara pelatihan keterampilan dan acuan resmi untuk mutu pelatihan. Begitu Badan Pembina memilih keterampilan-keterampilan strategis untuk pembangunan daerah berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, mungkin salah satu tugas pertama yang perlu dilakukan adalah mengembangkan uraian kompetensi yang baru atau meninjau kembali uraian kompetensi yang ada saat ini untuk keterampilan-keterampilan ini.
3. Mendapatkan keterampilan dan keahlian melalui bantuan eksternal, diharapkan dengan bantuan donor. Kemajuan teknologi dan pengetahuan diperlukan guna menghasilkan produk (barang) dan jasa yang memenuhi standar mutu internasional. Sumber-sumber daya tersebut tidak selalu tersedia di Aceh pada tahap pembangunan saat ini. Koperasi para produsen dan penyelenggara pelatihan keterampilan mungkin ingin mengundang tenaga ahli dari luar daerah dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan. Pada saat yang sama, dialog strategis dan terfokus dengan donor dapat mendorong terjadinya alih teknologi yang relevan dan pada akhirnya memfasilitasi terjadinya penyerapan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh produsen setempat.
4. Memupuk kewirausahaan dan lingkungan usaha yang kondusif untuk sektor jasa.

Secara strategis, adalah penting untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor jasa supaya dapat melayani permintaan yang timbul dari dan untuk mempercepat ekspansi agribisnis. Agribisnis tidak akan tumbuh dan berkembang apabila dibiarkan tanpa adanya dukungan yang memadai dari sektor-sektor lainnya. Agar agribisnis berhasil, dibutuhkan dukungan dari, misalnya, sektor perbankan, transportasi/ angkutan, percetakan, grosir dan eceran. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Aceh perlu memupuk kewirausahaan dan lingkungan usaha yang kondusif. Langkah-langkah seperti pengarusutamaan kewirausahaan pendidikan dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, perampingan peraturan-peraturan di bidang bisnis/ usaha dan pemberian insentif (misalnya penghapusan/ keringanan pajak selama beberapa tahun pertama pendirian usaha) akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor jasa

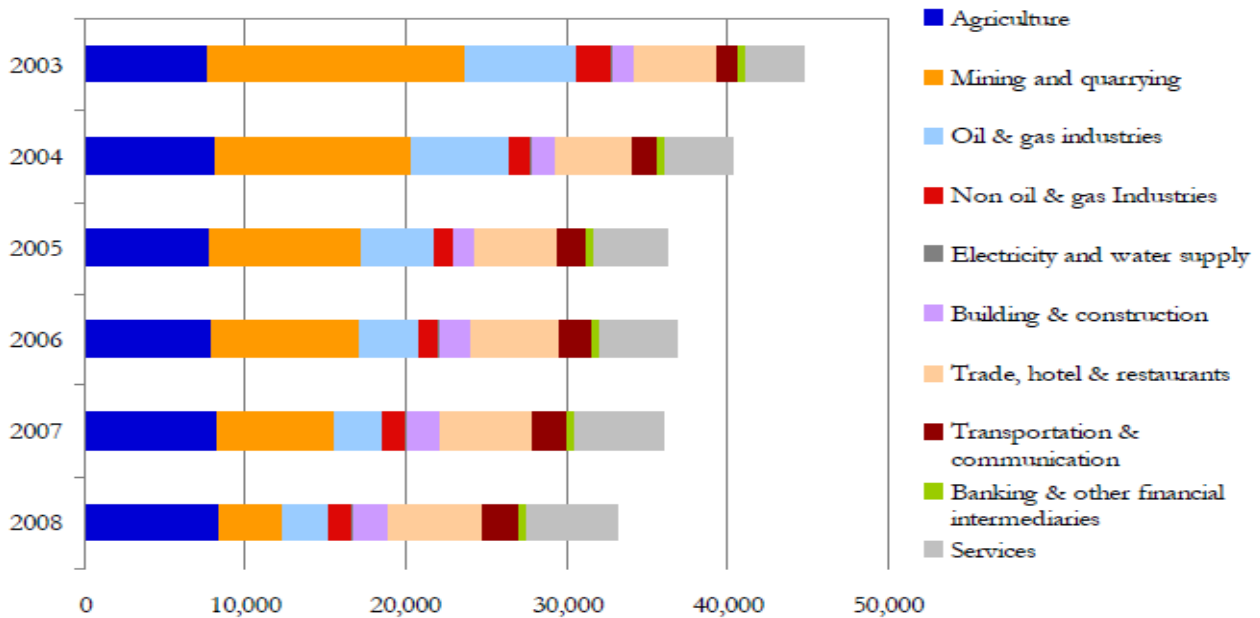
DAFTAR PUSTAKA

- Amung Ma'mun dan Yudha M. Saputra (2000). *Perkembangan Gerak dan Belajar Gerak*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Bank Indonesia; <http://infoukm.wordpress.com>
- BRR NAD-NIAS (2009) *Economy* (Banda Aceh).
- Daryanto, Arief, 2010, *Keunggulan Daya Saing dan Teknik identifikasi Komoditas Unggulan dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Regional*, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Desrochers, P. and Sautet, F. 2004: Cluster-based economic development, facilitation policy and the market process. *Review of Austrian Economics* 17(2/3), 233 – 245.
- Doeringer, P.B., dan Terkla, D.G. 1995, “Business Strategy and Cross-industri Clusters”, *Economic Development Quarterly*, Vol.9, No.3, 225_237, SAGE Publications Cuihong, Yang, 2000, “Study on Multiplier Effect of China Township and Village Enterprises on National Economy, Institute of Systems Science. Chinese Academy of Sciences.
- Paper submitted to the 13th International Conference on Input-Output Technique, August 21-25, 2000, Macerata, Italy.
- ILO, (1991), *The Dilemma of the Informal Sector. Report of the Director General, Part I*, the 78th Session of the International Labour Conference, Geneva
- ILO EAST project. *Guideline for developing market-driven community-based vocational training for out-of-school youth [Panduan untuk mengembangkan pelatihan kejuruan berbasis masyarakat yang digerakkan oleh pasar untuk kaum muda yang tidak bersekolah]* (Kantor ILO Jakarta).
- ILO (2005) *Training for rural economic empowerment (TREE) Project: Mid-term Evaluation Summary [Pelatihan untuk proyek pemberdayaan ekonomi pedesaan: rangkuman evaluasi jangka menengah]*, tersedia secara online di: http://www.ilo.org/keterampilan-keterampilan/what/projects/lang--en/WCMS_103528/index.htm [20 April 2010].
- . *Kerangka kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja muda: kasus dan pengalaman Indonesia*.
- IOM (2009) *Labour Market Assessment: Final report [Penilaian Pasar Kerja: Laporan Akhir]* – Bireuen (Aceh).
- IOM (2009) *Labour Market Assessment: Final report [Penilaian Pasar Kerja: Laporan Akhir]* – Lhokseumawe (Aceh).
- Kepel, et. Al, 2000, *Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sangihe Talaud*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad dan Hairul Aswandi. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 17, Nomor 1, Tahun 2002 : 27-45, BPFE, Yogyakarta
- Nazara, Suahasil, 1998, *Analisis Input-Output*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2007a) *AGENDA: Pembangunan Ekonomi Provinsi*

- Nanggroe Aceh Darussalam*, edisi awal (Aceh).
- (2007b) *ATLAS: Pembangunan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, edisi awal (Aceh).
- (2007c) *ATURAN: Pembangunan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, edisi awal (Aceh).
- Porter, M.E, 1990, *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press, New York
- Rosenfeld, SA. 1995. *Industrial Strength Strategies: Regional Business Clusters and Public Policy*. Washington DC: Aspen institute. hal 36.
- Sarosa, Wicaksono, (2000), “Menyoroti Sektor Informal Perkotaan,” Research and Development Director Urban and Regional Development Institute (URDI) diakses pada 7 Agustus 2004 dari <http://www.urdi.org/urdi/bulletin/volume-12a.php>
- Soemarjadi. (2001). *Pendidikan Keterampilan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- USAID Indonesia. 2007. *Jobs for the 21st century: Indonesia assessment [pekerjaan untuk abad ke 21: penilaian terhadap Indonesia]* (Jakarta).
- Yudha & Rudhyanto. (2005). *Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Keterampilan*. Depdiknas, Jakarta
- World Bank (2009) *Aceh Growth Diagnostic: Identifying the binding constraints to growth in a post-conflict and post-disaster environment [Diagnostik Pertumbuhan Aceh: Mengidentifikasi kendala-kendala yang mengikat terhadap pertumbuhan di lingkungan pasca konflik dan pasca bencana]* (Jakarta).
- World Bank and Bank Indonesia (2009) *Aceh Economic Update [Kondisi Terkini Perekonomian Aceh]*, Mei 2009 (Aceh).

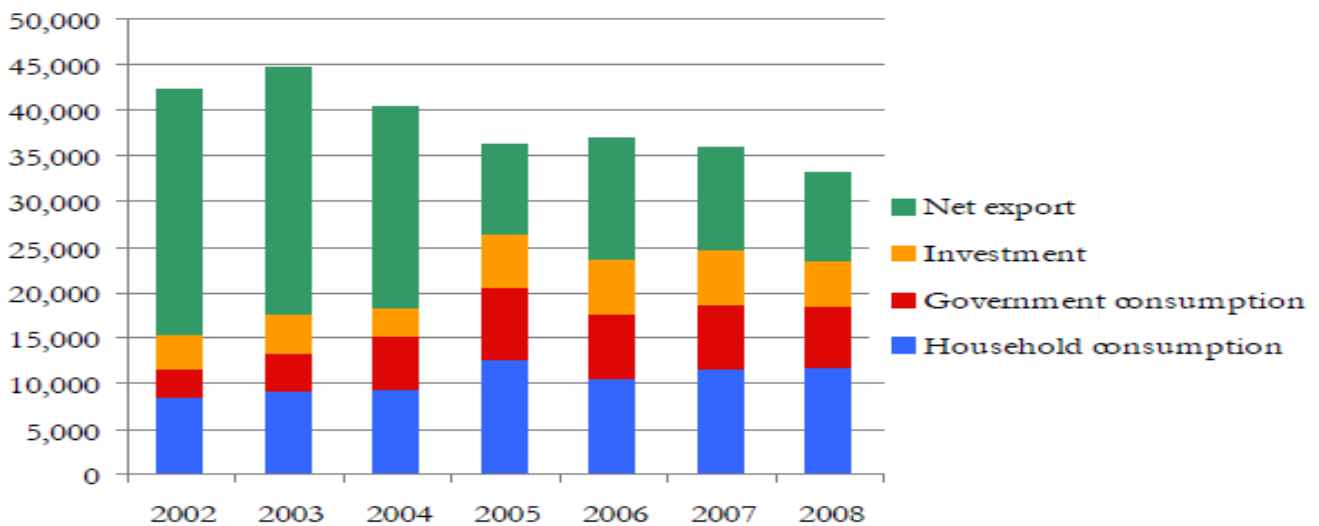
LAMPIRAN

Gambar 1: PDBD di Aceh menurut asal industri (dalam milyaran rupiah, harga konstan 2000)



Sumber: BPS-Statistik Aceh

Gambar 2: PDBD di Aceh berdasarkan pengeluaran (dalam milyaran rupiah, harga konstan 2000)



Sumber: Bank Indonesia dan perkiraan BPS

Tabel 1: Lapangan kerja menurut sektor dan gender (dalam persen)

	Porsi sektoral lapangan kerja (total gender)		Porsi perempuan dalam lapangan kerja	
	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional
	Pertanian, kehutanan dan perikanan	48.5	40.3	25.9
Pertambangan & penggalian	0.5	1.0	7.4	11.0
Industri pengolahan	5.3	12.2	34.5	30.2
Listrik, gas & air	0.2	0.2	6.6	7.9
Konstruksi	6.4	5.3	1.4	2.3
Perdagangan, restoran & hotels	15.6	20.7	25.7	33.5
Transportasi, pergudangan & komunikasi	5.5	6.0	9.7	10.4
Jasa keuangan, asuransi, real estate & bisnis	0.6	1.4	21.8	22.8
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	17.4	12.8	31.1	30.3
Total	100.0	100.0	25.3	27.4

Sumber: Survei angkatan kerja, BPS

Tabel 2: Pertumbuhan lapangan kerja dan output

	Pertumbuhan Output 2007-08 (%)	Pertumbuhan Lapangan kerja 2007-08 (%)	Lapangan kerja di	Output per lapangan kerja
Pertanian	2.0	-6.5	786,198	10.6
Pertambangan dan Penggalian	-34.2	-36.2	8,660	462.6
Industri pengolahan	-7.2	9.7	86,762	49.6
Listrik dan air	18.1	22.2	2,691	34.4
Bangunan & konstruksi	6.3	12.9	103,816	20.5
Perdagangan, Hotel & restoran	3.1	7.4	252,853	23.4
Angkutan & Komunikasi	6.1	6.9	88,842	24.4
Perbankan & perantara keuangan lainnya	5.6	59.3	9,427	58.4
Jasa	7.6	6.9	282,749	19.6
Total	-5.3	-0.1	1,621,998	20.4

Sumber: BPS, perhitungan pengarang

*: jutaan rupiah, harga konstan 2000

Tabel 3: Jumlah Tempat Produksi Dan Tenaga Kerja Di Industri Pengolahan Skala Besar Dan Menengah Di Aceh

Tipe Industri	Jumlah tempat produksi	Jumlah pekerja
Makanan, minuman dan tembakau	37	4,946
Produk kimia, minyak, batubara, karet dan plastic	9	1,605
Kertas dan hasil olahannya, percetakan dan penerbitan	2	1,151
Tekstil, garmen dan kulit	12	637
Produk mineral bukan logam, kecuali hasil olahan/ produk minyak dan batubara	16	532
Produk logam hasil olahan, mesin dan peralatan	10	476
Kayu, bambu, rotan, nipah dll., termasuk perabotan	6	199

Sumber: BPS-Statistik Provinsi Aceh

Tabel 4: Kapasitas pelatihan menurut jenis penyelenggara pelatihan

Penyelenggara pelatihan	Jumlah instruktur	Kapasitas pelatihan
Lembaga pemerintah	200	1050
Lembaga swasta	605	5020
Gabungan keduanya	7	260

Sumber: PKPA

Tabel 5: Kapasitas pelatihan menurut kategori dan Jenis penyelenggara

Kategori pelatihan	Lembaga pemerintah	Lembaga swasta	Gabungan	Total (%)
Pertanian, penkakan & peternakan	30	922	120	1072 (16.9)
Pengolahan makanan	60	397	140	597 (9.4)
Membuat pakaian dan bordir	0	1969	0	1969 (31.1)
Reparasi dan mekanik	770	785	0	1555 (24.6)
Keterampilan komputer	20	277	0	297 (4.7)
Kerajinan & pembuatan perabotan	170	565	0	735 (11.6)
Pertukangan di bidang perkayuan	0	50	0	50 (0.8)
Salon kecantikan	0	55	0	55 (0.9)

Sumber: PKPA